

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai bagaimana keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* muncul pada masa pemerintahan presiden Donald Trump. Dalam mendukung penelitian dan proses analisis, penulis menggunakan kerangka konseptual yang diusung oleh Robert D. Putnam dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*. Kerangka pemikiran *Two-Level Games* ini sederhananya menuntun kita untuk memahami bagaimana suatu kebijakan bisa lahir serta aktor-aktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kebijakan tersebut. *Two-Level Games* membagi proses negosiasi pengambilan kebijakan kedalam dua level. Level pertama adalah level internasional, sedangkan level kedua adalah level nasional atau domestik.

Keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* tentunya cukup meresahkan dunia mengingat posisi AS sebagai negara Annex I yang memiliki kewajiban serta komitmen besar di badan UNFCCC, terlebih lagi statusnya sebagai emitter GRK terbesar kedua setelah Tiongkok. Dengan status dan komitmen tersebut, AS diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal agar upaya mitigasi iklim global dapat berjalan dengan lancar dan signifikan. AS sebelumnya memutuskan untuk meratifikasi *Paris Agreement* pada masa pemerintahan presiden Barrack Obama, kemudian setelah periode kepresidenan Obama berakhir dan digantikan oleh Trump, AS malah memutuskan untuk membatalkan ratifikasi dan melepaskan diri dari segala

bentuk komitmen serta kewajiban yang dimilikinya dalam pelaksanaan *Paris Agreement*.

Melalui kerangka pemikiran *Two-Level Games*, penulis melihat bahwasanya keputusan ini tidak semata-mata muncul ke permukaan tanpa tujuan tertentu atau sebagaimana yang kerap disampaikan media, bahwa keputusan ini hanyalah sebatas upaya Trump untuk menggulingkan seluruh kebijakan Obama pada saat memimpin AS. Berdasarkan dua level analisis, internasional dan domestik, penulis melihat bahwasanya:

Pada ranah internasional, AS mengalami berbagai macam kendala dan kesulitan untuk dapat benar-benar berkontribusi dan tetap meratifikasi *Paris Agreement*. Salah satunya disebabkan oleh beratnya komitmen yang dipikul AS sebagai negara industri besar. Meski komitmen-komitmen yang AS miliki saat ini awalnya disampaikan langsung oleh Barrack Obama sebagai presiden AS pada periode bersangkutan, berdasarkan pernyataan Trump saat Ia memutuskan untuk mengeluarkan AS dari *Paris Agreement*, negaranya tidak lagi mampu melaksanakan komitmen tersebut karena dianggap akan merugikan dalam berbagai macam aspek. Yang pertama dan paling utama adalah kerugian ekonomi besar-besaran.

Kerugian ekonomi tentu menjadi hal yang paling ditakutkan oleh Trump mengingat menjaga dan meningkatkan perekonomian AS merupakan agenda utama administrasi yang tengah Ia pimpin. Dilansir oleh NERA Economic Consulting, Terhitung tahun 2025 saja, perekonomian AS dapat dirugikan sebesar 250 Triliyun US\$ karena pelaksanaan *Paris Agreement*, kemudian meningkat hingga 2500 Triliyun US\$ pada tahun 2040. Kebijakan lingkungan yang harus dilaksanakan AS dalam rangka mematuhi ketentuan

*Paris Agreement* untuk memotong produksi emisi GRK secara maksimal terpaksa membuat AS berupaya semaksimal mungkin untuk membatasi kegiatan industri serta mengupayakan pengalihan energi menjadi yang ramah lingkungan serta dapat diperbaharui. Kedua hal ini tentunya akan menghantarkan AS kepada berbagai macam problematika ekonomi, selain itu, AS juga harus menyetorkan sejumlah dana tetap setiap tahunnya kepada GCF untuk keperluan mitigasi iklim negara berkembang, berdasarkan pernyataan Trump, jumlah pendanaan ini merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan AS.

Selanjutnya, ketimpangan dalam peran negara maju dan berkembang didalam *Paris Agreement* menjadi konsiderasi lain bagi AS untuk hengkang. Sistem *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC) dimana terdapatnya perbedaan peran dan kontribusi negara Annex I dan Non-Annex I ini memang sudah menuai kritik yang besar dari berbagai kalangan atau negara. Terlebih negara-negara seperti Tiongkok dan India yang notabene juga merupakan emitter terbesar dunia, kedua negara ini bagi Trump sama sekali tidak menanggung beban kewajiban seberat yang ditanggung oleh AS.

Setelah level internasional, kita beralih ke level domestik. Menurut kerangka pemikiran *Two-Level Games*, suatu kebijakan luar negeri dapat tercetus apabila pemimpin negara atau negosiator memperoleh desakan dari kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri atau ranah domestik lainnya. Dalam kasus keluarnya AS dari *Paris Agreement* ini, diketahui bahwa peran dan reputasi Partai Republik yang merupakan partai asal Trump cukup banyak mempengaruhi terciptanya

keputusan tersebut. Hal pertama yang harus diketahui adalah, sebagian besar orang-orang yang berasal dari partai ini memiliki skeptisisme tersendiri terhadap perubahan iklim. Banyak yang berpikiran bahwa perubahan iklim tidak benar-benar ada, atau walaupun memang ada, hal ini sama sekali bukan tanggung jawab manusia. Melihat dan menimbang bahwa jumlah kursi senator AS saat ini lebih banyak diduduki oleh Republikan dibandingkan oposisinya, Demokrat, maka wajar saja apabila preferensi kebijakan cenderung akan lebih mengikuti preferensi partai ini. Terlebih mengingat bahwa keputusan Obama saat ingin meratifikasi *Paris Agreement* di tahun 2015 lalu tidak didukung kongres, maka tidak akan mudah untuk memastikan kebijakan tersebut akan dilanjutkan oleh periode kepresidenan selanjutnya.

Selain itu, penulis menemukan fakta bahwa terdapat peran dan campur tangan aktor non-pemerintah lainnya didalam terciptanya keputusan AS untuk meninggalkan *Paris Agreement*. Salah satunya adalah, Koch Industries. Koch Industries merupakan perusahaan industri besar yang bergerak dibanyak sektor produksi sekaligus merupakan salah satu dari puluhan perusahaan besar yang mendonasikan sejumlah uang untuk keperluan kampanye kandidat politik dari Partai Republik. 22 orang senator Republik yang diketahui menerima dana secara berulang dari perusahaan-perusahaan ini secara terbuka mengirimkan surat desakan untuk meninggalkan *Paris Agreement* kepada Trump. Melalui hal ini diketahui bahwa, industri-industri tersebut memang sedang berupaya untuk memasukkan kepentingan mereka ke dalam pemerintahan AS. Hal ini tidak begitu mengejutkan mengingat apabila AS benar-benar melaksanakan komitmennya terhadap *Paris Agreement*, maka industri merupakan pihak pertama yang akan terkena dampaknya. Sebagai kelompok bisnis, maka tentu



saja aktor-aktor ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi posisinya.

Melalui analisis dua level tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* tercetus dibawah pemerintahan Trump karena berbagai alasan dari mulai orientasi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, komitmen yang terlalu besar dan berpotensi merugikan hingga adanya dorongan dan desakan dari kelompok-kelompok domestik.

## 5.2 Saran

Penulis tentunya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan riset yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian ini, penulis menyadari bahwa keputusan AS untuk meninggalkan *Paris Agreement* tidaklah semata-mata bentuk egoisme Trump sebagai seorang pemimpin, melainkan pula hasil pengaruh dan desakan dari banyak pihak serta pertimbangan. Penulis juga menyadari bahwa, untuk mampu memahami bagaimana sebuah kebijakan lahir maka kita harus menempatkan diri sebagai pembuat kebijakan dan memikirkan konsiderasi yang harus diterima dan dipertimbangkan agar kebijakan terbaik dan paling menguntungkan dapat diambil. Dalam penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menganalisis lahirnya keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* ketika berada dibawah pemerintahan Trump melalui kerangka analisis yang telah disediakan oleh Robert D. Putnam. Pertama dengan melihat apa yang terjadi pada level internasional, lalu selanjutnya apa yang terjadi pada level domestik.

